# BAB 1

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Lahirnya organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bebas dan terbuka untuk masyarakatnya dalam berkumpul bersama, hal tersebut dikarenakan mulai terbentuknya kelompok-kelompok yang berkepentingan dan kemudian diatur lebih jelasnya kedalam UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyaraktaan (ormas). Dalam organisasi kemasyarakatan dijelaskan mengenai fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) salah satunya dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yakni: sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

Kemunculan undang-undang yang mengatur pergerakan organisasi kemasyarakatan (ormas), sudah pasti di tegaskan bahwa anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya masing-masing. Di masa Orde Baru dapat disebut bahwa ormas tumbuh dan berkembang sebagai *sparing partner* bagi pemerintah.Pembangunan yang mengunakan pendekatan modernisme meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak cukup mengembangkan pemerataan, baik pemerataan partisipasi maupun hasil-hasil pembangunan.Salah satu dimensi pertumbuhan ormas pada masa Orde baru adalah kaitannya dengan lembaga-lembaga atau LSM-LSM luar negeri yang datang ke Indonesia yang pada umumnya bertujuan pengembangan masyarakat.

Era 80-an kata (Budairi,2002:76) merupakan era kebangkitan ormas dimana sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Kegiatan ormas tersebut, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah telah mencakup banyak sektor seperti; usaha kecil dan sektor informal, usaha bersama dan perkoperasian, industri kecil dan perkreditan, kesehatan, penyediaan air bersih`dan sanitasi, perbaikan lingkungan pedesaan dan perkotaan dan lain sebagainya. Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kita harapkan tidak bekerja untuk kepentingan partai atau golongan dan juga untuk kepentingan pemodal raksasa lembaga internasional atau ormas yang tidak tenggelam dalam politik proposal. Akan tetapi, harus diakui apa yang dikemukakan (Hartiningsih,2001:29) bahwa telah terjadi polarisasi dalam ormas yakni sebagai berikut :

Pertama; Ormas yang aktif mempromosikan neoliberalisme, Jenis ormas ini biasanya bekerjasama dengan proyek besar bank dunia.

Kedua ; Ormas reformis, yang menerima pendanaan skala menengah dari lembaga-lembaga sosial demokratik dan pemerintah regional dan lokal yang progresif.

Ketiga ; Ormas radikal, yang terlibat dalam gerakan-gerakan anti globalisasi, anti rasis dan sebagainya. Ada kecenderungan ormas yang mempunyai visi dan misi yang jelas mulai memposiskan diri mereka dan berpihak pada pengembangan masyarakat. Hanya saja kehadiran mereka di era Orde Baru lebih banyak diposisikan sebagai lembaga yang selalu merepotkan setiap kebijakan pemerintah, bahkan selalu dicurigai setiap ruang geraknya.

Organisasi-organisasi sejenis seperti PKK dan Karang Taruna bentukan pemerintah yang sama-sama berorientasi masyarakat bawah/akar rumput, tapi kehadiran mereka lebih merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang mempunyai misi khusus dalam mensukseskan program pemerintah. Oleh karenanya tidak mengherankan jika dilapangan terjadi perbedaan cara dan misi pelayanan kepada masyarakat terutama peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh ormas dan lembaga bentukan pemerintah tadi. Tidak dapat dipungkiri kalau aktivitas ormas lebih mengenai sasaran di banding lembaga bentukan pemerintah termasuk di dalamnya birokrasi pemerintahan di daerah.

Salah satu bentuk kegiatan ormas yang sangat menonjol adalah dapat merangsang tumbuhnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam membangun dirinya dan keluarganya dan lingkungannya yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.Terjadinya perbedaan ini dimungkinkan karena ketidaksamaan visi, misi dan program antar keduanya, selain kebebasan ruang gerak yang melatarbelakangi.Saatnya sekarang pemerintah harus merubah pandangan terhadap kehadiran ormas, bahwa kehadirannya juga merupakan salah satu solusi dari lembaga di luar negara (birokrasi pemerintahan) yang dapat memberi peran pemberdayaan kepada masyarakat.

Pada Era saat ini eksistensi organisasi kemasyarakatan sudah sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat di setiap daerah di seluruh Indonesia.Namun keberadaan sebagian ormas saat ini juga mulai banyak 4 mendapat kritikan karena aktifitas serta kegiatan yang dijalankannya sedikit menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan serta landasan, aturan main, dan tujuan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Dari beberapa kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan yang dianggap menyimpang dari ketentuan peraturan di antaranya sebagai berikut :

1. Organisasi kemasyarakatan banyak yang terlibat aktif dalam kegiatankegiatan partai politik
2. Anggota organisasi kemasyarakatan banyak yang terdaftar sebagai kader dan pengurus aktif dari partai politik
3. Organisasi kemasyarakatan banyak yang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum seperti aksi demonstrasi yang anarkis, pengrusakan fasilitas umum, serta melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.
4. Seringnya terjadi konflik di internal organisasi serta konflik antar organisasi kemasyarakatan
5. Dll.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Definisi dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Ormas : Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[Pemuda Pancasila](https://www.tempo.co/tag/pemuda-pancasila) merupakan organisasi yang dideklarasikan pada 28 oktober 1959 di Jakarta. Adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang membidani kelahiran organisasi masyarakat alias ormas tersebut. Dikutip dari bpk-pp.com, IPKI sendiri adalah sayap politik dari para petinggi militer yang masih aktif dalam kedinasan. Tokoh pendirinya terdiri dari [Ahmad Yani](https://nasional.tempo.co/read/1533206/awal-terbentuknya-pemuda-pancasila-diinisiasi-para-tokoh-militer),  AH Nasution, Gatot Subroto dan lainnya.

Seiring berjalannya waktu, organisasi masyarakat Pemuda Pancasila meluas hingga hampir ke seluruh kota – kota besar di Indonesia. Dengan bertambahnya anggota serta cabang membuat organisasi masyarakat Pemuda Pancasila ini di kenal oleh hampir sebagian masyarakat Indonesia. Di Jawa Barat sendiri organisasi masyarakat Pemuda Pancasila sudah cukup lama berdiri dan sering menebarkan hal – hal baik terhadap masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang daftar atau minat menjadi anggota dan mengabdi ke organisasi masyarakat Pemuda Pancasila di seluruh daerah Jawa Barat.

Di Jawa Barat, jumlah anggota nya terdiri lebih dari 180ribu anggota, tandanya di wilayah Jawa Barat itu sendiri banyak masyarkat yang minat menjadi bagian keanggotaan Pemuda Pancasila Jawa Barat. Dengan berjalannya waktu keanggotaan Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat selalu bertambah dan Pemuda Pancasila ini adalah salah satu ormas yang berbasis keanggotakan menggunakan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan para anggota resmi Pemuda Pancasila ini di lindungi hokum terkecuali pelecehan dan narkotika.

Tidak sedikit ”oknum” anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila ini yang melanggar aturan dari organisasi dan membuat kegaduhan, sangat di sayangkan jika hal seperti ini terus terjadi. Seharusnya organisasi masyarakat Pemuda Pancasila ini dapat menjadi penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan untuk tujuan organisasi serta sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Dan tidak sedikit juga anggota bahkan senior – senior dan pengurus organisasi masyarakat Pemuda Pancasila ini memberikan hal – hal baik untuk masyarakat Kota Bandung dengan mengadakan kegiatan – kegiatan positif dan menjadi penyalur aspirasi masyarakat Kota Bandung.

Jika ada “ oknum “ yang bukan anggota resmi Pemuda Pancasila akan di serahkan ke pihak yang berwajib serta membawa seragam yang “oknum” tersebut pakai saat membuat kegaduhan, dan jika anggota resmi Pemuda Pancasila yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) membuat kegaduhan akan segera di tindak lanjuti dengan cara di bina agar tidak membuat kesalahan kembali untuk kedepannya.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap Peran Humas Ormas Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat dalam meningkatkan citra positif di pandangan masyarakat.

## Fokus Masalah

Fokus Masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “ STRATEGI HUMAS ORGANISASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF (Studi Deskriptif Kualitatif di Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat)” yang objek utamanya adalah organisasi masyarakat (ORMAS) Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan , maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepengurusan Pemuda Pancasila jika adanya “oknum” yang mencemarkan nama baik Pemuda Pancasila?
2. Apa kendala yang dihadapi humas Pemuda Pancasila dalam menyampaikan kegiatan sosial?
3. Bagaimana humas Pemuda Pancasila meningkatkan citra positif dalam pandangan masyarakat?

## Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas , maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui cara kepengurusan organisasi Pemuda Pancasila jika adanya anggota “oknum” yang mencemarkan nama baik Pemuda Pancasila
2. Untuk mengetahui kendala humas organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dalam menyampaikan kegiatan sosial atau mendengarkan aspirasi atau keluhan dari masyarakat
3. Untuk mengetahui cara humas organisasi masyarakat Pemuda Pancasila meningkatkan citra positif di pandangan masyarakat atas adanya “oknum” keanggotaan yang membuat sebagian pandangan masyarakat menjadi negatif

## Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut,di harapkan hasil penelitian ini memiliki signifikan dan berguna bagi pihak terutama :

1. Kegunaan Teoritis (Akademis)

Bagi peneliti , untuk mengetahui kinerja seorang humas dalam sebuah organisasi masyarakat, serta mendalami dan mendalami peran seorang humas sehingga penulis mampu membandingkan antar teori – teori yang telah di dapatkan dan di pelajari di kampus dengan praktik yang terjadi di lapangan.

1. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dalam upaya meningkatnya citranya. Dan juga sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa maupun umum yang berminat mendalami masalah – masalah organisasi masyarakat Pemuda Pancasila.

## Sistematika Penulisan

Usulan penelitian ini terdiri dari III BAB dengan beberapa sub bab yang erat kaitannya antar satu bab dengan bab yang lainnya. Untuk lebih jelas, berikut ini akan di uraikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

* BAB I PENDAHULUAN

Uraian Latar Belakang masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Lokasi dan Waktu Penelitian.

* BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Uraian Landasan teori ini membahas mengenai peran humas.

* BAB III METODE PENELITIAN :

Uraian Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan Kunci, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Keabsahan Data.

* BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Uraian Objek Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan

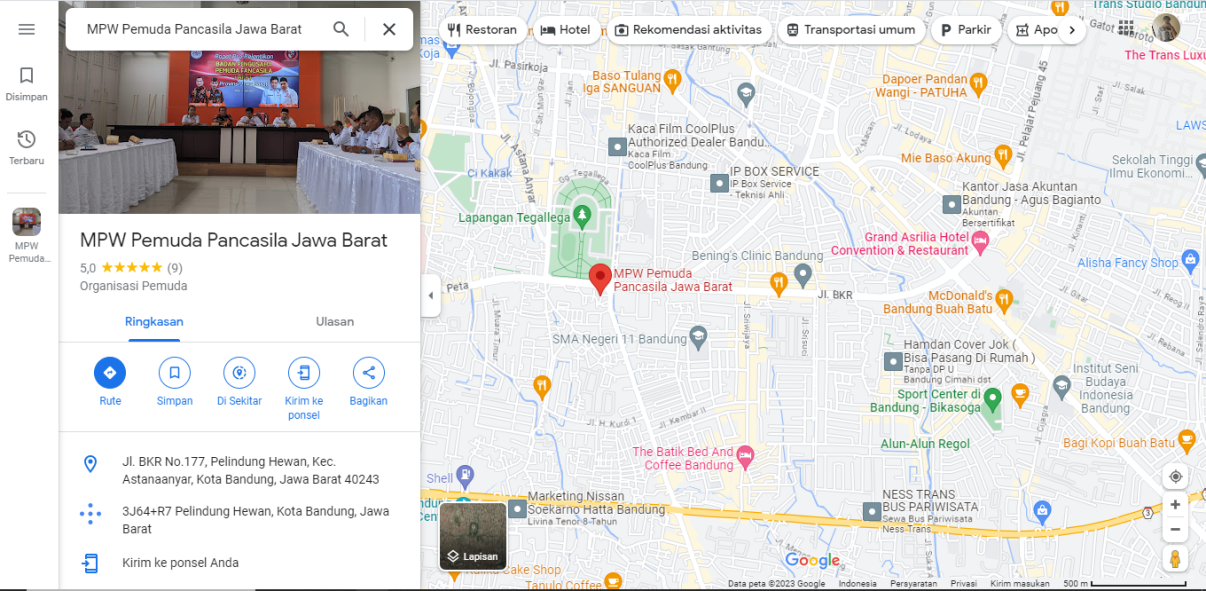
* BAB V PENUTUP :

Uraian Simpulan, Rekomendasi

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat sebagai tempat penelitian untuk menyelesaikan skripsinya. Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat merupakan salah satu organisasi masyarakat terbesar di Jawa Barat.

Peneliti memilih Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat untuk melaksanakan penelitiannya karena penulis ingin lebih mendalami dan menerapkan ilmu yang sudah penulis dapatkan pada saat perkuliaahan..

Pemilihan lokasi penelitian ini juga di karenakan jarak yang tidak terlalu jauh dan rekomendasi dari pembimbing karena banyak hal menarik yang ada di Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat, Pemuda Pancasila MPW Jawa Barat bertempat di Jl. BKR No.177, Pelindung Hewan, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243.

**Gambar 1.1** Lokasi Penelitian

Peneliti memperkirakan lamanya waktu yang diperlukan untuk penelitian yaitu selama enam bulan dimulai dari bulan maret sampai agustus 2023. Tahapannya dimulai dari pembuatan proposal sampai akhir tindakan dan siding skripsi. Adapun rincian jadwal penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1** Waktu Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Kegiatan** | **Tahun** | **2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bulan** | **Maret** | | | | **April** | | | | **Mei** | | | | **Juni** | | | | **Juli** | | | | **Agustus** | | | |
| **Minggu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Tahap Persiapan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Studi Literatur | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Observasi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mengurus Perizinan (Pra) Penelitian | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penulisan Proposal Usulan Penelitian | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengajuan Judul Usulan Penelitian | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengesahan Judul Usulan Penelitian | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bimbingan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tahap Penelitian | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Observasi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. wawancara | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pengolahan Data | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Analisa Data | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Penyusunan Laporan | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tahap Pengujian | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Seminar Usulan Penelitian | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Revisi usulan Penelitian | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sidang Skripsi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Revisi Skripsi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |